

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaku ekonomi dalam konteks Indonesia terdiri dari tiga pilar utama yakni Badan Usaha milik Negara (BUMN), Koperasi, dan Swasta. Pada kenyataannya, dahulu peranan BUMN di Indonesia sangat kurang diperhatikan dalam struktur ekonomi nasional yang menyebabkan ketidakstabilan beban ekonomi nasional. Hal ini nyata terjadi pada tahun 1997 saat krisis melanda beberapa negara di Asia, Indonesia terkena imbas yang sangat parah hingga fluktuasi nilai tukar uang tidak terkendali. Kondisi seperti ini banyak disebabkan oleh beban hutang besar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta hingga ambruknya perekonomian nasional dan pemerintahan pada saat itu, setelah terjadinya reformasi besar-besaran pasca krisis, peranan BUMN bagi perekonomian terlihat sangat dominan. Tahun 2012 saja, total aset BUMN diperkirakan mencapai Rp 2.950 triliun dan sekitar Rp 690 triliun adalah total aktiva tetap. Dari Rp 690 triliun, Rp 121 triliun diantaranya aset berupa tanah dan bangunan. Aset BUMN sebesar Rp 2.950 triliun itu total Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat mencapai 40 persen.

Perusahaan sebagai entitas bisnis menjalankan usahanya dimana perusahaan itu berada. Kegiatan utama perusahaan umumnya merupakan kegiatan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Kegiatan perusahaan ini ternyata berdampak pada lingkungan dan memunculkan wacana tentang tanggung jawab

sosial perusahaan. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja namun juga masyarakat dan lingkungan sehingga tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sebuah kewajiban sejak dikeluarkannya UU PT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 pasal 3 ayat 1 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Di sisi lain dengan disahkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah semakin memberatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan karena sebelumnya telah diwajibkan menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan telah didukung dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan salah satu instrumen perwujudan tanggung jawab sosial yang wajib dilaksanakan bagi seluruh BUMN sebagai wujud kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Program kemitraan ditujukan bagi para pengusaha kecil agar mereka dapat meningkatkan kemampuan usahanya agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bagian laba BUMN. Sedangkan program bina lingkungan ditujukan

untuk memberikan manfaat masyarakat sekitar wilayah BUMN melalui pemanfaatan bagian laba BUMN.

Mempertanggung jawabkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tidaklah sulit, kecuali kalau BUMN itu menyalahgunakannya. Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pertanggungjawaban yang diminta hanyalah rencana realisasi dana. Sebagian besar pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) lemah di beberapa BUMN, namun demikian, terdapat beberapa BUMN yang bukan saja telah mengelola PKBL dengan baik, melainkan juga telah memiliki kinerja yang memuaskan.

Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat di ukur dengan tingkat efektivitas penyaluran dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman PKBL menjadi salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-10/MBU/2014. Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan hanya digunakan untuk program kemitraan saja, sedangkan untuk program bina lingkungan tidak ada kinerja yang di ukur kecuali penyaluran dana sesuai rencana.

SOP (*Standard Operating Procedure*) merupakan segala aturan atau prosedur tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di suatu perusahaan. Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu kewajiban BUMN Pembina adalah menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan PKBL yang disahkan

melalui Surat Keputusan Direksi, SOP PKBL dibuat yang bertujuan sebagai pedoman petunjuk pelaksanaan secara terperinci bagi para Manager dan Staff PKBL dalam mengelola dana PKBL sehingga tepat sasaran dan berdampak positif pada bisnis perusahaan.

Kebijakan akuntansi mengenai Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2012 mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Kebijakan akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang diterapkan termasuk dasar pengukuran, meliputi dasar penyusunan laporan keuangan, kas dan setara kas, pinjaman yang diberikan, penyesihan penurunan nilai pinjaman, aset tetap, piutang pinjaman bermasalah, angsuran belum teridentifikasi, kelebihan pembayaran angsuran, utang lain-lain, aset neto, penerimaan dana dari BUMN Pembina / BUMN lain, pendapatan dan beban.

Salah satu BUMN yang menerapkan program CSR dalam bentuk PKBL yaitu PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai objek penelitian. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan BUMN yang bergerak di sektor industri persemenan. Berdasarkan catatan Asosiasi Industri Semen Indonesia 2015 (ASI) PT Semen Indonesia merupakan perseroan yang masih memimpin pasar pada saat ini baik dikawasan Indonesia maupun Asean. PT Semen Indonesia adalah *Holding Company* dari tiga perusahaan persemenan terbesar dan tersebar di berbagai

wilayah Indonesia. Didukung dengan keberadaan dari masing-masing *operating company* yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sapoetra (2013) menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur penyaluran dana PKBL sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku walaupun melewati proses yang cukup panjang sedangkan untuk kinerja PKBL sendiri mengalami perbaikan semenjak tahun 2009 akibat dimasukkannya sistem scoring unit PKBL dalam performansi manajemen sehingga penulis termotivasi untuk melihat bagaimana pengelolaan PKBL pada salah satu BUMN. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan mengenai efektivitas penyaluran dana PKBL dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman.

Dari latar belakang di atas maka judul yang diambil dalam penelitian ini “**Analisis Kinerja PKBL dan Kebijakan Akuntansi (Studi Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme kebijakan penyaluran dana PKBL dan prosedur pelaksanaan PKBL?
2. Bagaimana tingkat kinerja pelaksanaan penyaluran dana PKBL dan pengembalian dana Program Kemitraan di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk?
3. Apakah kebijakam akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang ditetapkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pelaksanaan penyaluran dana PKBL, mengevaluasi dan menganalisis penilaian kinerja PKBL, dan melakukan review atas kebijakan pencatatan dan pelaporan akuntansi yang sesuai.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil melalui penulisan skripsi ini yaitu :

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam penggunaan dana yang dipakai sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi apabila nantinya ada yang meneliti dengan objek yang sejenis, sehingga hasil penelitian ini lebih sempurna.

1.5. Kontribusi Penelitian

Sapoetra dan Hartanti (2013) melakukan penelitian tentang analisa kinerja pkbl dan kebijakan akuntansi pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian dilakukan di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok, Jakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau catatan yang dimiliki oleh perusahaan mengenai

pelaporan CSR berbentuk PKBL. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 cara yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang akan diteliti antara lain Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007, Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012, Surat Keputusan Direksi tahun 2009 tentang Pedoman Pencatatan Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan kepustakaan terkait. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui dokumen kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan proses pencatatan administrasi kantor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja unit PKBL. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini mencakup 2 (dua) aspek, yaitu : a). aspek keuangan mengacu pada efektivitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman, b). aspek administrasi mengacu pada prosedur penyaluran dana PKBL. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Selain itu, metode komparatif dengan membandingkan tahun yang diteliti dengan tahun sebelumnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau catatan yang dimiliki oleh perusahaan. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini mencakup 2 (dua) aspek, yaitu : a). aspek keuangan mengacu pada efektivitas penyaluran dana dan tingkat

kolektibilitas pengembalian pinjaman, b). aspek administrasi mengacu pada prosedur penyaluran dana PKBL / *Standard Operating Procedure* PKBL

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri semen yaitu PT Semen Indonesia (Persero). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.